



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARTO PANCONO
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 14969

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 888.334.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/90 m2 di LONCAT INDAH BLOK L NO. 1 RT. 029 RW. 006 Kode Pos. , [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 188.334.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/70 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 235.500.000**

1. MOBIL, MAZDA SEDAN Tahun 1995, WARISAN Rp. 55.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SWIFT MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. MOTOR, HONDA BLADE SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. ----**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	1.123.834.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.123.834.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.